



Atas: Sejumlah mobil terendam banjir di pertokoan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).



Kanan: Foto udara sejumlah mobil melintasi banjir akibat luapan air Sungai Ciliwung di Jatinegara, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

## Kiriman dari Bogor

# Banjir 1-4 Meter Rendam Jadetabek

JAKARTA (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, banjir yang merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat yang diguyur hujan intensitas sangat deras.

"Jakarta dan sekitarnya rata-rata banjir air kiriman dari Puncak, Bogor yang semuanya ini dialirkan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung," kata Deputy Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta, Selasa (4/3).

Guswanto mengatakan, hujan deras yang mengguyur Kota Bo-

gor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem karena berdasarkan data hasil monitoring Tim Meteorologi BMKG, ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm perhari.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang

melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Adapun untuk banjir di Kota Bekasi yang dilaporkan muka air tertingginya 4 meter, katanya, terjadi karena pada saat bersamaan daerah itu menerima air

kiriman hulu DAS Ciliwung dan ditambah adanya hujan deras dengan intensitas 165-208 mm perhari di beberapa lokasi.

"Hari ini di Sumur Batu Bekasi hampir 208 mm perhari. Ini terjadi dipengaruhi pertumbuhan awan konvektif yang cukup signifikan pada skala meso-sirkulasi siklonik yang

mengakibatkan perlambatan angin dan seterusnya," katanya. Guswanto menambahkan, banjir Jakarta dan daerah sekitarnya ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada tahun 2020, dimana saat itu BMKG mencatat curah hujan lokal

\* Bersambung hal 7 kol 1

## Analisis Kontraksi Ekonomi

Dr Suparmono MSI



KONTRAKSI ekonomi merupakan salah satu hal yang dikhawatirkan, selain stagnasi kualitas Pendidikan dan menu runnya standar pelayanan kepada masyarakat akibat efisiensi anggaran. Perpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran merupakan bentuk respon terhadap proyeksi defisit fiskal yang diperkirakan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Seluruh kementerian/Lembaga terkecuali dengan kebijakan ini tidak terkecuali sektor swasta dan pelaku ekonomi lainnya. Pasalnya pemerintah menargetkan efisiensi Rp 306,69 triliun.

Efisiensi bukanlah sebuah prestasi bila dilakukan secara sporadis, apalagi pemanfaatannya justru bukan untuk hal produktif, bahkan menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Apalagi bila hasil efisiensi digelontorkan untuk dana investasi BPI Danantara yang pengelolanya pun menimbulkan kasak kusuk di masyarakat. Perlambatan ekonomi sudah

\* Bersambung hal 7 kol 1

## DUGAAN PENERIMAAN GRATIFIKASI 11 Mobil Yapto Diangkut ke KPK



Dua karyawan melintas di depan mobil mewah hasil sitaan dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Soerjosoemarno di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Soerjosoemarno (YS) ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rup-

basan) KPK di Cawang Jakarta Timur. Sebanyak 11 unit kendaraan tersebut disita terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

\* Bersambung hal 7 kol 5

## PERLU DIPERKETAT Pengawasan Tata Kelola Migas

YOGYA (KR) - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menilai pengawasan terhadap tata kelola minyak dan gas (migas) perlu diperkuat setelah munculnya dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

Peneliti Pukat UGM Yuris Rezha Darmawan mengatakan, pemberantasan praktik mafia migas tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus disertai perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat.

"Dalam memberantas praktik-praktik mafia migas. Tidak hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat di sektor migas," ujarnya dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (4/3).

Menurut Yuris, kasus dugaan korupsi ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap tata kelola migas, termasuk dalam kebijakan impor. Terlebih lagi, praktik tersebut berlangsung dalam kurun waktu cukup lama, yaitu antara 2018 hingga 2023. Ia menjelaskan, skema korupsi tersebut diawali pengondisian agar produksi minyak mentah dalam negeri menurun yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan impor minyak mentah. "Modus seperti ini sebetulnya bukan yang pertama kali. Bahkan di kasus-kasus korupsi impor yang lain, modus korupsi terencana selalu dimulai dari pengondisian

\* Bersambung hal 7 kol 1

Jadwal Imsakiyah	Zuhur	Asar	Maghrib	Isya	Imsak	Subuh
Rabu, 5 Maret 2025	11:53	14:57	18:09	19:09	04:18	04:28

## TERSANGKA DUGAAN PEMERASAN Akhirnya Nikita Mirzani Ditahan



Artis Nikita Mirzani (dua kanan) dan asistennya resmi ditahan usai diperiksa Ditressiber Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025).

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya secara resmi menahan artis Nikita Mirzani (NM) dan asistennya berinisial IM setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Siber terkait dugaan kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang dokter berinisial RG.

"Penyidik dari Ditressiber Polda Metro Jaya telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Selasa (4/3).

Ade Ary menjelaskan, kedua tersangka akan ditahan 20 hari ke depan untuk melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa tersebut.

\* Bersambung hal 7 kol 5

## PROYEK PROMOSI DAN PUBLISITAS RP 2,6 T Eks PM Malaysia Terduga Kasus Korupsi

KUALA LUMPUR (KR) - Komisi Antirasuah Malaysia (SPRM) menetapkan mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob sebagai terduga dalam kasus korupsi dan penggunaan ilegal dana promosi dan publisitas semasa menjabat. PM ke-9 Malaysia itu telah dikenakan Pasal 36 (1) Undang-Undang SPRM 2009 terkait laporan harta kekayaan.

Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki di Putrajaya mengatakan, dalam penggeledahan sebuah kondominium juga ditemukan uang. "Jika benar uang tersebut milik Sabri, dia harus memberikan penjelasan," kata Azam, Senin (3/3) waktu setempat.

Penggeledahan juga dilakukan di sebuah rumah dan tiga lokasi lainnya. Di salah satu lokasi, SPRM

menemukan dan menyita uang tunai senilai sekitar 170 juta ringgit (sekitar Rp 626 miliar) dalam berbagai mata uang asing dan 16 kilogram emas batangan

yang nilainya diperkirakan hampir 7 juta ringgit. Penggeledahan dilakukan setelah SPRM menahan empat pejabat senior pada pemerintahan Sabri.

SPRM telah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi dan penggunaan ilegal dana promosi dan publisitas program Keluarga Malaysia pada

awal 2024. Proyek promosi dan publisitas itu bernilai hingga 700 juta ringgit (setara Rp 2,6 triliun).

\* Bersambung hal 7 kol 5



Ketua Komisi Antirasuah Malaysia (SPRM) Tan Sri Azam Baki menunjukkan uang tunai yang disita dalam penggeledahan berkaitan dengan dugaan korupsi mantan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya.

### SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● SELAMA 20 tahun jadi bengkel, baru pertama ada ibu-ibu menyervisikan sepeda motornya yang masih baru sampai 9 bulan tidak diambil. Saya jadi khawatir, jangan-jangan itu sepeda motor curian. Saat dia mengambil motor, saya tanya sebabnya, dia menjawab, "Ndhak dinggo bojoku marani gendhakan." (Parjana Bengkel, Karakon VI RT 02 RW 12 Sidomoyo, Gedean Sleman 55564)-f